

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR KEP-50/KN/2025
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodasi penataan organisasi pada kementerian, lembaga, badan, dan komisi negara berupa perubahan nomenklatur, pemisahan, penggabungan, penghapusan, dan pembentukan baru berdasarkan kebijakan pemerintah, Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 187/KN/2022 tentang Pembagian Tugas dan Lingkup/Wilayah Kerja pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta melaksanakan ketentuan mengenai pembagian tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pembagian Tugas pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
2. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1213);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.

- KESATU : Menetapkan pembagian tugas pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara meliputi:
- a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Seksi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Objek tugas yang berasal dari kementerian, lembaga, badan, dan komisi negara dengan nomenklatur lama yang telah diterima dan/atau masih dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini, tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 187/KN/2022 tentang Pembagian Tugas dan Lingkup/Wilayah Kerja pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku objek tugas yang berasal dari kementerian, lembaga, badan, dan komisi negara yang dilaksanakan pada masa transisi dan masih menggunakan nomenklatur lama, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 187/KN/2022 tentang Pembagian Tugas dan Lingkup/Wilayah Kerja pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sampai dengan selesainya proses likuidasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 187/KN/2022 tentang Pembagian Tugas dan Lingkup/Wilayah Kerja pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2025

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA
NOMOR KEP-50/KN/2025
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS PADA INSTANSI
VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA

PEMBAGIAN TUGAS
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
1.	KPKNL Tangerang I	Pengelolaan Kekayaan Negara	A. Pengelolaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga/Badan/Komisi negara di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, yang meliputi: 1) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 2) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 3) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan 4) Kementerian Agama 5) Badan Penyelenggara Haji 6) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 7) Kementerian Hukum 8) Kementerian Hak Asasi Manusia 9) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 10) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 11) Kementerian Badan Usaha Milik Negara 12) Kementerian Dalam Negeri

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			13) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 14) Kementerian Transmigrasi 15) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 16) Kementerian Kelautan dan Perikanan 17) Kementerian Ketenagakerjaan 18) Kementerian Komunikasi dan Digital 19) Kementerian Perhubungan 20) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 21) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 22) Kementerian Pertahanan 23) Kementerian Sekretariat Negara 24) Kejaksaan Republik Indonesia 25) Tentara Nasional Indonesia 26) Dewan Perwakilan Daerah 27) Badan Keamanan Laut 28) Badan Kepegawaian Negara 29) Badan Narkotika Nasional 30) Badan Nasional Penanggulangan Bencana 31) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 32) Badan Pemeriksa Keuangan 33) Badan Pengawas Pemilihan Umum

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>34) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</p> <p>35) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>36) Kementerian Luar Negeri</p> <p>37) Badan Standardisasi Nasional</p> <p>38) Lembaga Administrasi Negara</p> <p>39) Lembaga Ketahanan Nasional</p> <p>40) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia</p> <p>41) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia</p> <p>42) Dewan Ketahanan Nasional</p> <p>43) Komisi Pemberantasan Korupsi</p> <p>44) Arsip Nasional Republik Indonesia</p> <p>45) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia</p> <p>46) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila</p> <p>47) Badan Karantina Indonesia</p> <p>B. Pengelolaan kekayaan negara lain-lain di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, yang meliputi:</p> <p>1) Barang Gratifikasi</p> <p>2) Aset Lain-Lain</p> <p>3) Hak atas Bumi, Air, dan Tata Ruang Angkasa</p> <p>4) Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT)</p> <p>5) Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)</p> <p>6) Barang Rampasan Negara Kejaksaan</p> <p>7) Barang Rampasan Negara Komisi Pemberantasan Korupsi</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP	
			C.	Pengelolaan barang milik negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
		Penilaian	A.	<p>Objek penilaian yang berada di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk barang milik negara dan kekayaan negara lain-lain sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengelolaan kekayaan negara KPKNL Tangerang I 2) Permohonan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengurusan piutang negara KPKNL Tangerang I 3) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk barang milik negara dan kekayaan negara lain-lain yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Badan/Komisi negara lingkup pengelolaan kekayaan negara KPKNL Tangerang I yang berdomisili di luar wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan 4) Permohonan penilaian untuk benda sitaan oleh pihak yang berwenang sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengelolaan kekayaan negara KPKNL Tangerang I

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>B. Objek penilaian yang berada di wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan atas permohonan penilaian dan analisis yang terpisah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber Daya Alam 2) Kekayaan Negara yang Dipisahkan 3) Penilaian Lainnya dalam rangka Pengelolaan Kekayaan Negara 4) Barang Milik Daerah/ Kekayaan Daerah 5) Aset Badan Usaha Milik Negara/ Daerah 6) Aset Lembaga/ Badan Hukum Non Swasta Lainnya 7) Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara untuk Keperluan Penyusunan Neraca Pemerintah Pusat maupun Pengelolaan Kekayaan Negara
		Piutang Negara	<p>A. Pengurusan dan pengelolaan piutang negara di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan yang berasal dari penyerah piutang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 2) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 3) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Masyarakat 4) Kementerian Hukum 5) Kementerian Hak Asasi Manusia 6) Kementerian Imigrasi dan Masyarakat 7) Kementerian Agama

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

6

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			8) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 9) Kementerian Badan Usaha Milik Negara 10) Kementerian Dalam Negeri 11) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 12) Kementerian Transmigrasi 13) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 14) Kementerian Kelautan dan Perikanan 15) Kementerian Ketenagakerjaan 16) Kementerian Komunikasi dan Digital 17) Kementerian Perhubungan 18) Kementerian Luar Negeri 19) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 20) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 21) Kementerian Pertahanan 22) Kementerian Sekretariat Negara 23) Kejaksaan Republik Indonesia 24) Tentara Nasional Indonesia 25) Dewan Perwakilan Daerah 26) Badan Keamanan Laut 27) Badan Kepegawaian Negara 28) Badan Narkotika Nasional 29) Badan Nasional Penanggulangan Bencana 30) Kementerian Pelindungan Pekerja

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

7

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</p> <p>31) Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>32) Badan Pengawas Pemilihan Umum</p> <p>33) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</p> <p>34) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>35) Badan Standardisasi Nasional</p> <p>36) Lembaga Administrasi Negara</p> <p>37) Lembaga Ketahanan Nasional</p> <p>38) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia</p> <p>39) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia</p> <p>40) Dewan Ketahanan Nasional</p> <p>41) Komisi Pemberantasan Korupsi</p> <p>42) Arsip Nasional Republik Indonesia</p> <p>43) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia</p> <p>44) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila</p> <p>45) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</p> <p>46) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan domisili di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan</p> <p>47) Aset Kredit Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank Dagang Nasional - Bank Pelita Indonesia - Bank Istimarat - Bank Deka

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<ul style="list-style-type: none"> - Bank Centris - Bank Central Asia - Bank Tiara Asia - Bank Duta - Bank Tamara - Bank Nusa Nasional - Bank Rama - Bank Asia Pacific - Bank Aken - Bank Umum Servitia - Bank Intran - Bank Alfa - Bank Sino - Bank Kharisma - Bank Arya Panduarta - Bank Dewa Rutji - Bank Uppindo - Bank Hastin International - Bank Metropolitan - Bank Lautan Berlian - Bank Bahari - Bank Dagang dan Industri - Bank Bapede Indonesia - Bank Indotrade - Bank Putera Multikarsa - Bank Ratu - Bank Prasadha Utama - Bank Unibank - Bank Papan Sejahtera - Bank Modern - Bank Ficorinvest - Bank International Indonesia - Bank Lippo - Bank Rakyat Indonesia - Bank Sembada Artha Nugroho - Bank Umum Koperasi Indonesia - Bank Artamedia 48) DJKN [Aset Kredit Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)] 49) Pemerintah Daerah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
		Lelang	<p data-bbox="916 326 1485 543">A. Objek lelang yang berada di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan atas permohonan lelang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="986 550 1474 692">1) Eksekusi benda sitaan Panitia Urusan Piutang Negara dari KPKNL Tangerang I <li data-bbox="986 700 1497 1789">2) Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Kreditur: <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1059 849 1401 917">a. PT Bank Negara Indonesia <li data-bbox="1059 924 1401 991">b. PT Bank Rakyat Indonesia <li data-bbox="1059 999 1485 1031">c. PT Bank CIMB Niaga <li data-bbox="1059 1039 1485 1106">d. PT Bank CIMB Niaga Syariah <li data-bbox="1059 1113 1342 1181">e. PT Bank Pan Indonesia <li data-bbox="1059 1188 1433 1255">f. PT Bank Pan Indonesia Syariah <li data-bbox="1059 1263 1422 1295">g. PT Bank Permata <li data-bbox="1059 1303 1422 1370">h. PT Bank Permata Syariah <li data-bbox="1059 1378 1485 1410">i. PT Bank OCBC NISP <li data-bbox="1059 1417 1485 1485">j. PT Bank OCBC NISP Syariah <li data-bbox="1059 1492 1497 1559">k. PT Bank Panin Dubai Syariah <li data-bbox="1059 1567 1417 1634">l. Koperasi Simpan Pinjam <li data-bbox="1059 1642 1417 1709">m. Koperasi Simpan Pinjam Syariah <li data-bbox="1059 1716 1497 1749">n. Lembaga Pembiayaan <li data-bbox="1059 1756 1315 1789">o. Perorangan <li data-bbox="986 1796 1497 2045">3) Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia atas permohonan kreditur sebagaimana tercantum dalam angka 2 <li data-bbox="986 2053 1362 2163">4) Eksekusi barang rampasan negara Kejaksaan <li data-bbox="986 2170 1458 2202">5) Eksekusi barang gadai <li data-bbox="986 2210 1458 2277">6) Eksekusi benda sitaan penyidik Komisi

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP	
				<p>Pemberantasan Korupsi sesuai Pasal 47A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019</p> <p>7) Kementerian/Lembaga/ Badan/Komisi negara dan pemohon lelang lainnya yang termasuk dalam pengelolaan kekayaan negara KPKNL Tangerang I</p> <p>8) Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Hukum Lainnya Milik Negara</p> <p>9) Eksekusi barang gratifikasi</p> <p>10) Bank Indonesia</p> <p>11) Balai Lelang</p> <p>12) Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT)</p> <p>13) Sukarela domisili pemohon di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan</p> <p>14) Lelang eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
2.	KPKNL Tangerang II	Pengelolaan Kekayaan Negara	A.	<p>Pengelolaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga/ Badan/Komisi negara di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, yang meliputi:</p> <p>1) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p> <p>2) Kementerian Koordinator Bidang</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			Pemberdayaan Masyarakat 3) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 4) Kementerian Koordinator Bidang Pangan 5) Kementerian Kesehatan 6) Kementerian Keuangan 7) Kementerian Koperasi 8) Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 9) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 10) Kementerian Kehutanan 11) Kementerian Pariwisata 12) Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif 13) Kementerian Pekerjaan Umum 14) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 15) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 16) Kementerian Pemuda dan Olahraga 17) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 18) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 19) Kementerian Kebudayaan 20) Kementerian Perdagangan 21) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 22) Badan Pangan Nasional 23) Badan Gizi Nasional 24) Kementerian Sosial 25) Kepolisian Negara Republik Indonesia

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

12

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			26) Mahkamah Agung 27) Mahkamah Konstitusi 28) Majelis Permusyawaratan Rakyat 29) Dewan Perwakilan Rakyat 30) Badan Informasi Geospasial 31) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 32) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 33) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 34) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 35) Kementerian Perindustrian 36) Kementerian Pertanian 37) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 38) Badan Pengawas Obat dan Makanan 39) Badan Pengawas Tenaga Nuklir 40) Badan Pusat Statistik 41) Badan Intelijen Negara 42) Badan Siber dan Sandi Negara 43) Badan Riset dan Inovasi Nasional 44) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 45) Komisi Pengawas Persaingan Usaha 46) Komisi Yudisial 47) Komisi Pemilihan Umum 48) Ombudsman Republik Indonesia 49) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			50) Otoritas Jasa Keuangan
			<p>B. Pengelolaan kekayaan negara lain-lain di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Benda Cagar Budaya yang Belum Ditetapkan Statusnya sebagai Barang Milik Negara 2) Hak atas Kekayaan Intelektual 3) Aset Eks Bank Dalam Likuidasi 4) Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional 5) Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 6) Aset Eks Kepabeanan dan Cukai
			<p>C. Pengelolaan barang milik negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Kabupaten Tangerang</p>
		Penilaian	<p>A. Objek penilaian yang berada di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk barang milik negara dan kekayaan negara lain-lain sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengelolaan kekayaan negara KPKNL Tangerang II 2) Permohonan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengurusan piutang negara KPKNL Tangerang II 3) Permohonan penilaian

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>dan analisis yang terpisah untuk barang milik negara dan kekayaan negara lain-lain yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Badan/Komisi negara lingkup pengelolaan kekayaan negara KPKNL Tangerang II yang berdomisili di luar wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan</p> <p>4) Permohonan penilaian untuk benda sitaan oleh pihak yang berwenang sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengelolaan kekayaan negara KPKNL Tangerang II</p> <p>B. Objek penilaian yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang atas permohonan penilaian dan analisis yang terpisah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber Daya Alam 2) Kekayaan Negara yang Dipisahkan 3) Penilaian Lainnya dalam rangka Pengelolaan Kekayaan Negara 4) Barang Milik Daerah/ Kekayaan Daerah 5) Aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah 6) Aset Lembaga/Badan Hukum Non Swasta Lainnya 7) Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara untuk Keperluan Penyusunan Neraca Pemerintah Pusat maupun Pengelolaan Kekayaan Negara <p>A. Pengurusan dan pengelolaan piutang negara di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota</p>
		Piutang Negara	A.

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>Tangerang Selatan yang berasal dari penyerah piutang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2) Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 4) Kementerian Koordinator Bidang Pangan 5) Kementerian Kesehatan 6) Kementerian Keuangan 7) Kementerian Koperasi 8) Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 9) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 10) Kementerian Kehutanan 11) Kementerian Pariwisata 12) Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif 13) Kementerian Pekerjaan Umum 14) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 15) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 16) Kementerian Pemuda dan Olahraga 17) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 18) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 19) Kementerian Kebudayaan 20) Kementerian

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			Perdagangan 21) Kementerian Perindustrian 22) Kementerian Pertanian 23) Kementerian Sosial 24) Kepolisian Negara Republik Indonesia 25) Mahkamah Agung 26) Mahkamah Konstitusi 27) Majelis Permusyawaratan Rakyat 28) Dewan Perwakilan Rakyat 29) Badan Informasi Geospasial 30) Badan Intelijen Negara 31) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 32) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 33) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 34) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 35) Badan Pengawas Obat dan Makanan 36) Badan Pengawas Tenaga Nuklir 37) Badan Pusat Statistik 38) Badan Riset dan Inovasi Nasional 39) Badan Siber dan Sandi Negara 40) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 41) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 42) Komisi Pengawas Persaingan Usaha 43) Komisi Yudisial 44) Komisi Pemilihan Umum

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>45) Ombudsman Republik Indonesia</p> <p>46) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</p> <p>47) Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>48) Badan Pangan Nasional</p> <p>49) Badan Gizi Nasional</p> <p>50) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</p> <p>51) Aset Kredit Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang Berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank Surya - Bank Hokindo - Bank Subentra - Bank Umum Nasional - Bank Danamon Indonesia - Bank Bali - Bank Risjad Salim Internasional - Bank PDFCI - Bank Niaga - Bank Pos Nusantara - Bank Sewu International - Bank Sanho - Bank Dharmala - Bank Ciputra - Bank Indonesia Raya - Bank Danahutama - Bank Central Dagang - Bank Budi International - Bank Orient - Bank Sahid Gajah Perkasa - Bank Dana Asia - Bank Yakin Makmur - Bank Namura Internusa - Bank Tata - Bank Pesona Kridayana - Bank Putra Surya Perkasa - Bank Mashill Utama - Bank Baja International

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<ul style="list-style-type: none"> - Bank Bumi Raya Utama - Bank Bumi Daya - Bank Dagang Negara - Bank Ekspor Impor Indonesia - Bank Pembangunan Indonesia - Bank Negara Indonesia - Bank Tabungan Negara - Bank Mandiri - Bank Universal - Jaya Bank International - Bank Perniagaan Umum - Bank Pertiwi - Bank Overseas Express - Bank Permata - Bank Prima Ekspres 52) DJKN (Aset Kredit Eks Bank Dalam Likuidasi) 53) Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Daerah Lainnya 54) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan domisili di Kabupaten Tangerang dan di luar wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan
		Lelang	<p>A. Objek lelang yang berada di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan atas permohonan lelang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Eksekusi benda sitaan Panitia Urusan Piutang Negara dari KPKNL Tangerang II 2) Eksekusi benda sitaan pengadilan

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>3) Eksekusi benda sitaan pajak</p> <p>4) Eksekusi harta pailit/kurator</p> <p>5) Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Kreditur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PT Bank Tabungan Negara b. PT Bank Tabungan Negara Syariah c. PT Bank Mandiri d. PT Bank Syariah Indonesia e. PT Bank Mega f. PT Bank Mega Syariah g. PT Bank Central Asia h. PT Bank Central Asia Syariah i. PT Bank Danamon Indonesia j. PT Bank Danamon Indonesia Syariah k. Bank Pembangunan Daerah l. Bank Pembangunan Daerah Syariah m. Bank Perkreditan Rakyat n. Bank Perkreditan Rakyat Syariah o. Pemegang hak tanggungan pertama lainnya yang tidak termasuk dalam lingkup/wilayah kerja KPKNL Tangerang II <p>6) Eksekusi jaminan fidusia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia atas permohonan kreditur sebagaimana tercantum dalam angka 5</p> <p>7) Sitaan Kepolisian</p> <p>8) Sitaan Polisi Air/Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>9) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai</p> <p>10) Kementerian/Lembaga/ Badan/Komisi negara dan pemohon lelang lainnya yang termasuk dalam pengelolaan kekayaan negara KPKNL Tangerang II</p> <p>11) Balai harta peninggalan</p> <p>12) Sukarela domisili pemohon di Kabupaten Tangerang</p> <p>13) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</p> <p>14) Eksekusi barang temuan</p> <p>15) Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan untuk pemenuhan pidana uang pengganti atau pidana denda</p> <p>16) Lelang eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</p> <p>17) Eksekusi benda sitaan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>18) Eksekusi benda sitaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer</p> <p>19) Eksekusi barang bukti sitaan yang berasal dari penanganan tindak pidana kehutanan sesuai Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			20) Lelang lainnya di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA
NOMOR KEP-50/KN/2025
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS PADA INSTANSI
VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA

PEMBAGIAN TUGAS
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
1.	KPKNL Jakarta I	Pengelolaan Kekayaan Negara	A. Pengelolaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga/Badan/Komisi negara di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi: 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat 2) Dewan Perwakilan Rakyat 3) Mahkamah Agung 4) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 5) Kementerian Koordinator Bidang Pangan 6) Kementerian Luar Negeri 7) Kementerian Hukum 8) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 9) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 10) Kementerian Kebudayaan 11) Kementerian Perhubungan 12) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 13) Kementerian Pemuda dan Olahraga 14) Kementerian

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p data-bbox="1059 333 1417 558">Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional</p> <p data-bbox="986 558 1469 707">15) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p data-bbox="986 707 1362 782">16) Badan Narkotika Nasional</p> <p data-bbox="986 782 1362 857">17) Badan Pengawas Pemilihan Umum</p> <p data-bbox="986 857 1490 932">18) Badan Riset dan Inovasi Nasional</p> <p data-bbox="986 932 1362 981">19) Komisi Pemilihan Umum</p> <p data-bbox="986 981 1497 1056">20) Ombudsman Republik Indonesia</p>
			<p data-bbox="916 1056 1497 1729">B. Pengelolaan kekayaan negara lain-lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:</p> <ol data-bbox="986 1206 1497 1729" style="list-style-type: none"> 1) Barang Rampasan Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat 2) Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Jakarta Pusat 3) Hak atas Kekayaan Intelektual 4) Benda Cagar Budaya yang Belum Ditetapkan Statusnya sebagai Barang Milik Negara 5) Aset Eks Bank Dalam Likuidasi
		Penilaian	<p data-bbox="916 1729 1497 1878">C. Pengelolaan barang milik negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Kota Jakarta Pusat</p> <p data-bbox="916 1878 1497 2282">A. Objek penilaian yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas:</p> <ol data-bbox="986 1978 1497 2282" style="list-style-type: none"> 1) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk barang milik negara dan kekayaan negara lain-lain sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengelolaan kekayaan

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p data-bbox="986 331 1485 368">negara KPKNL Jakarta I</p> <p data-bbox="986 368 1485 667">2) Permohonan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara sesuai dengan pembagian lingkup/wilayah kerja pengurusan piutang negara KPKNL Jakarta I</p> <p data-bbox="986 667 1485 1191">3) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk barang milik negara dan kekayaan negara lain-lain yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Badan/Komisi negara lingkup pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta I yang berdomisili di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta</p> <p data-bbox="922 1191 1485 2280">B. Objek penilaian yang berada di wilayah Kota Jakarta Pusat atas permohonan penilaian dan analisis yang terpisah berupa:</p> <ol data-bbox="986 1390 1485 2280" style="list-style-type: none"> 1) Sumber Daya Alam 2) Kekayaan Negara yang Dipisahkan 3) Penilaian Lainnya dalam rangka Pengelolaan Kekayaan Negara 4) Barang Milik Daerah/ Kekayaan Daerah 5) Aset Badan Usaha Milik Negara/ Daerah 6) Aset Lembaga/Badan Hukum Non Swasta Lainnya 7) Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara untuk Keperluan Penyusunan Neraca Pemerintah Pusat maupun Pengelolaan Kekayaan Negara 8) Sitaan oleh Pihak yang Berwenang sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			seperti Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Oditurat Militer, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
		Piutang Negara	<p>A. Pengurusan dan pengelolaan piutang negara di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari penyerah piutang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat 2) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 3) Kementerian Sekretariat Negara 4) Kementerian Luar Negeri 5) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 6) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 7) Kementerian Kebudayaan 8) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 9) Kementerian Badan Usaha Milik Negara 10) Badan Intelijen Negara 11) Badan Pengawas Tenaga Nuklir 12) Badan Pusat Statistik 13) Badan Standardisasi Nasional 14) Badan Siber dan Sandi Negara 15) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 16) Komisi Pemilihan Umum

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			17) Komisi Pengawas Persaingan Usaha 18) Lembaga Administrasi Negara 19) Badan Riset dan Inovasi Nasional c.q. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 20) Ombudsman Republik Indonesia 21) Lembaga Penjamin Simpanan 22) Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum 23) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 24) DJKN [Piutang Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Eks Penanganan Kejaksaan] 25) Aset Kredit Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang Berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> - Bank Umum Nasional - Bank Danamon Indonesia - Bank Bali - Bank Risjad Salim Internasional - Bank PDFCI - Bank Niaga - Bank Pos Nusantara - Bank Sewu International - Bank Sanho - Bank Dharmala - Bank Ciputra - Bank Indonesia Raya - Bank Danahutama - Bank Central Dagang - Bank Budi International - Bank Orient - Bank Sahid Gajah Perkasa - Bank Dana Asia - Bank Yakin Makmur

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<ul style="list-style-type: none"> - Bank Namura Internusa - Bank Tata - Bank Pesona Kridayana - Bank Putra Surya Perkasa - Bank Mashill Utama - Bank Baja International - Bank Bumi Raya Utama - Bank Bumi daya - Bank Dagang Negara - Bank Ekspor Impor Indonesia - Bank Pembangunan Indonesia - Bank Negara Indonesia - Bank Tabungan Negara - Bank Mandiri - Bank Universal - Bank Jaya International - Bank Perniagaan Umum - Bank Pertiwi - Bank Overseas Express - Bank Permata - Bank Prima Ekspres 26) Pemerintah Daerah DKI Jakarta 27) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan domisili di Kotamadya Jakarta Pusat
		Lelang	<p>A. Objek lelang yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas permohonan lelang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Eksekusi benda sitaan Panitia Urusan Piutang Negara dari KPKNL Jakarta I 2) Balai Lelang 3) Eksekusi benda sitaan Pengadilan

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>Negeri/Pengadilan Agama/Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat</p> <p>4) Eksekusi benda sitaan Pajak Lingkup Kanwil DJP Jakarta Pusat</p> <p>5) Eksekusi benda sitaan Pajak Lingkup Kanwil DJP WP Besar</p> <p>6) Eksekusi Harta Pailit yang kuratornya berdomisili di Jakarta Pusat</p> <p>7) Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Kreditur:</p> <p>a) PT Bank Mandiri</p> <p>b) PT Bank Syariah Indonesia</p> <p>c) Standard Chartered Bank</p> <p>d) Bank Perkreditan Rakyat</p> <p>e) Bank Perkreditan Rakyat Syariah</p> <p>f) PT Bank OCBC NISP</p> <p>8) Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia domisili kreditur di Jakarta Pusat</p> <p>9) Kementerian/Lembaga/ Badan/Komisi negara dan pemohon lelang lainnya yang termasuk dalam pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta I</p> <p>10) Aset Bank Indonesia</p> <p>11) Pemerintah Daerah domisili di Jakarta Pusat</p> <p>12) Badan Usaha Milik Negara/Daerah domisili di Jakarta Pusat</p> <p>13) Balai Harta Peninggalan</p> <p>14) Sukarela domisili pemohon di Jakarta Pusat</p> <p>15) Aset Eks Bank Dalam Likuidasi domisili di Jakarta Pusat</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			16) Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional/PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) domisili di Jakarta Pusat 17) Aset Eks <i>Settlement</i> Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU) domisili Jakarta Pusat 18) Pemohon lelang domisili di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta
2.	KPKNL Jakarta II	Pengelolaan Kekayaan Negara	A. Pengelolaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga/ Badan/Komisi negara di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi: 1) Dewan Perwakilan Daerah 2) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 3) Kementerian Sekretariat Negara 4) Kementerian Keuangan 5) Kementerian Kesehatan 6) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 7) Kementerian Pertanian 8) Badan Karantina Indonesia 9) Badan Pangan Nasional 10) Badan Gizi Nasional 11) Kementerian Kelautan dan Perikanan 12) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 13) Kementerian Kehutanan 14) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 15) Kementerian Transmigrasi 16) Kejaksaan Republik

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p data-bbox="986 331 1519 368">Indonesia</p> <p data-bbox="986 368 1519 443">17) Badan Informasi Geospasial</p> <p data-bbox="986 443 1519 555">18) Badan Nasional Penanggulangan Bencana</p> <p data-bbox="986 555 1519 593">19) Komisi Yudisial</p> <p data-bbox="986 593 1519 667">20) Lembaga Administrasi Negara</p> <p data-bbox="986 667 1519 742">21) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</p> <p data-bbox="914 742 1519 779">B. Pengelolaan kekayaan negara lain-lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:</p> <p data-bbox="986 779 1519 966">1) Barang Rampasan Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Utara</p> <p data-bbox="986 966 1519 1079">2) Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Jakarta Utara</p> <p data-bbox="986 1079 1519 1153">3) Aset Eks Kepabeanan dan Cukai</p> <p data-bbox="986 1153 1519 1265">4) Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam</p> <p data-bbox="914 1265 1519 1303">C. Pengelolaan barang milik negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu</p>
		Penilaian	<p data-bbox="914 1497 1519 1609">A. Objek penilaian yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas:</p> <p data-bbox="986 1609 1519 1946">1) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk barang milik negara dan kekayaan negara lain-lain sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta II</p> <p data-bbox="986 1946 1519 2245">2) Permohonan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengurusan piutang negara KPKNL Jakarta II</p> <p data-bbox="986 2245 1519 2282">3) Permohonan penilaian</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>dan analisis yang terpisah untuk barang milik negara dan kekayaan negara lain-lain yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Badan/Komisi negara lingkup pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta II yang berdomisili di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>B. Objek penilaian yang berada di wilayah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu atas permohonan penilaian dan analisis yang terpisah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber Daya Alam 2) Kekayaan Negara yang Dipisahkan 3) Penilaian Lainnya dalam rangka Pengelolaan Kekayaan Negara 4) Barang Milik Daerah/ Kekayaan Daerah 5) Aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah 6) Aset Lembaga/Badan Hukum Non Swasta Lainnya 7) Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara untuk Keperluan Penyusunan Neraca Pemerintah Pusat maupun Pengelolaan Kekayaan Negara 8) Sitaan oleh Pihak yang Berwenang sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Oditurat Militer, dan Penyidik

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP	
		Piutang Negara	A.	Pegawai Negeri Sipil Pengurusan dan pengelolaan piutang negara di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari penyerah piutang: 1) Dewan Perwakilan Rakyat 2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 4) Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 5) Kementerian Hukum 6) Kementerian Hak Asasi Manusia 7) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 8) Kementerian Ketenagakerjaan 9) Kementerian Kelautan dan Perikanan 10) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11) Kementerian Pemuda dan Olahraga 12) Arsip Nasional Republik Indonesia 13) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 14) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 15) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 16) Badan Riset dan Inovasi Nasional c.q. Badan Tenaga Nuklir Nasional 17) Dewan Ketahanan Nasional

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>18) Komisi Pemberantasan Korupsi</p> <p>19) Komisi Yudisial</p> <p>20) Bank Indonesia</p> <p>21) DJKN [Piutang Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Eks Penanganan Kepolisian)</p> <p>22) Aset Kredit Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) - Bank Istimarat - Bank Deka - Bank Centris - Bank Central Asia (BCA) - Bank Tiara Asia - Bank Duta - Bank Tamara - Bank Nusa Nasional (BNN) - Bank Rama - Bank Asia Pasific - Bank Aken - Bank Umum Servitia - Bank Intan - Bank Alfa - Bank Sino - Bank Kharisma - Bank Arya Panduarta - Bank Dewa Rutji - Bank Uppindo - Bank Hastin International - Bank Metropolitan - Bank Lautan Berlian - Bank Bahari - Bank Dagang dan Industri - Bank Bapede Indonesia - Bank Indotrade - Bank Putera Multikarsa - Bank Ratu - Bank Prasadha Utama - Bank Unibank - Bank Papan Sejahtera

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<ul style="list-style-type: none"> - Bank Modern - Bank Ficorinvest - Bank International Indonesia - Bank Lippo - Bank Rakyat Indonesia - Bank Sembada Arta Nugroho - Bank Umum Koperasi - Bank Artamedia - Bank Patriot <p>23) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan domisili di Kotamadya Jakarta Utara</p>
		Lelang	<p>A. Objek lelang yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas permohonan lelang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Eksekusi benda sitaan Panitia Urusan Piutang Negara dari KPKNL Jakarta II 2) Balai Lelang 3) Eksekusi benda sitaan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Kejaksaan Negeri Jakarta Utara 4) Eksekusi benda sitaan Pajak Lingkup Kanwil DJP Jakarta Utara 5) Eksekusi benda sitaan Pajak Lingkup Kanwil DJP WP Jakarta Khusus 6) Eksekusi Harta Pailit yang kuratornya berdomisili di Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu 7) Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Kreditur: <ol style="list-style-type: none"> a) PT Bank Rakyat Indonesia b) PT Bank Permata c) PT Bank Harda d) PT Bank Maybank e) PT Bank Maybank

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>Syariah</p> <p>f) PT Bank Muamalat Indonesia</p> <p>8) Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia domisili kreditur di Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu</p> <p>9) Barang yang dikuasai/tidak dikuasai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai</p> <p>10) Kementerian/Lembaga/Badan/Komisi negara dan pemohon lelang lainnya yang termasuk dalam pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta II</p> <p>11) Pemerintah Daerah domisili di Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu</p> <p>12) Badan Usaha Milik Negara/Daerah domisili di Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu</p> <p>13) Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam</p> <p>14) Sukarela domisili pemohon di Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu</p> <p>15) Aset Eks Bank Dalam Likuidasi domisili di Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu</p> <p>16) Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional/PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) domisili di Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu</p> <p>17) Aset Eks <i>Settlement</i> Obligor Penyelesaian</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU) domisili Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu</p> <p>18) Sitaan atau temuan Kepolisian/Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</p> <p>19) Pemohon lelang domisili di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta</p>
3.	KPKNL Jakarta III	Pengelolaan Kekayaan Negara	<p>A. Pengelolaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga/Badan/Komisi negara di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Badan Pemeriksa Keuangan 2) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3) Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 4) Kementerian Agama 5) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 6) Badan Penyelenggara Haji 7) Kementerian Sosial 8) Kementerian Ketenagakerjaan 9) Kementerian Perdagangan 10) Kementerian Pekerjaan Umum 11) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 12) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 13) Kementerian Pariwisata 14) Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif 15) Kementerian

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 16) Badan Intelijen Negara 17) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 18) Badan Pengawas Tenaga Nuklir 19) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 20) Badan Standardisasi Nasional 21) Komisi Pemberantasan Korupsi 22) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 23) Otoritas Jasa Keuangan
			B. Pengelolaan kekayaan negara lain-lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi: 1) Barang Rampasan Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Barat 2) Barang Rampasan Negara Komisi Pemberantasan Korupsi 3) Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Jakarta Barat 4) Barang Gratifikasi 5) Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
			C. Pengelolaan barang milik negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Kota Jakarta Barat
		Penilaian	A. Objek penilaian yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas: 1) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk barang milik negara dan kekayaan negara lain-lain sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p data-bbox="1061 331 1461 438">pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta III</p> <p data-bbox="986 438 1461 775">2) Permohonan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengurusan piutang negara KPKNL Jakarta III</p> <p data-bbox="986 775 1493 1303">3) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk barang milik negara dan kekayaan negara lain-lain yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Badan/Komisi negara lingkup pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta III yang berdomisili di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta</p> <p data-bbox="917 1303 1493 2282">B. Objek penilaian yang berada di wilayah Kota Jakarta Barat atas permohonan penilaian dan analisis yang terpisah berupa:</p> <ol data-bbox="986 1497 1493 2282" style="list-style-type: none"> 1) Sumber Daya Alam 2) Kekayaan Negara yang Dipisahkan 3) Penilaian Lainnya dalam rangka Pengelolaan Kekayaan Negara 4) Barang Milik Daerah/ Kekayaan Daerah 5) Aset Badan Usaha Milik Negara/ Daerah 6) Aset Lembaga/Badan Hukum Non Swasta Lainnya 7) Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara untuk Keperluan Penyusunan Neraca Pemerintah Pusat maupun Pengelolaan Kekayaan Negara 8) Sitaan oleh Pihak yang

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>Berwenang sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Oditurāt Militer, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p>
		Piutang Negara	<p>A. Pengurusan dan pengelolaan piutang negara di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari penyerah piutang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dewan Perwakilan Daerah 2) Mahkamah Konstitusi 3) Badan Pemeriksa Keuangan 4) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 5) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan 6) Kementerian Dalam Negeri 7) Kementerian Perindustrian 8) Kementerian Perdagangan 9) Kementerian Pekerjaan Umum 10) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 11) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 12) Kementerian Transmigrasi 13) Kementerian Pariwisata 14) Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif 15) Kementerian

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional</p> <p>16) Badan Nasional Penanggulangan Bencana</p> <p>17) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</p> <p>18) Badan Pengawas Obat dan Makanan</p> <p>19) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia</p> <p>20) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</p> <p>21) Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>22) DJKN [Aset Kredit Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)]</p> <p>23) Rumah Sakit dalam lingkup tugas Kementerian Kesehatan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RS Persahabatan - RS Kanker Dharmais - RS Ketergantungan Obat - RSPI Prof. Dr. Sulianti - RSJ Dr. Soeharto Heerjan <p>24) Rumah Sakit lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan</p> <p>25) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan domisili di Kotamadya Jakarta Barat dan di luar wilayah DKI Jakarta</p>
		Lelang	<p>A. Objek lelang yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas permohonan lelang sebagai berikut:</p> <p>1) Eksekusi benda sitaan Panitia Urusan Piutang</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p data-bbox="1061 338 1398 408">Negara dari KPKNL Jakarta III</p> <p data-bbox="986 413 1278 451">2) Balai Lelang</p> <p data-bbox="986 456 1461 632">3) Eksekusi benda sitaan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Kejaksaan Negeri Jakarta Barat</p> <p data-bbox="986 637 1461 750">4) Eksekusi benda sitaan Pajak Lingkup Kanwil DJP Jakarta Barat</p> <p data-bbox="986 755 1437 892">5) Eksekusi Harta Pailit yang kuratornya berdomisili di Kota Jakarta Barat</p> <p data-bbox="986 897 1497 1034">6) Eksekusi objek hak tanggung sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggung Kreditur:</p> <p data-bbox="1061 1039 1398 1108">a) PT Bank Negara Indonesia</p> <p data-bbox="1061 1113 1497 1151">b) PT Bank Central Asia</p> <p data-bbox="1061 1156 1497 1226">c) PT Bank Central Asia Syariah</p> <p data-bbox="1061 1231 1369 1268">d) PT Bank Mega</p> <p data-bbox="1061 1273 1369 1343">e) PT Bank Mega Syariah</p> <p data-bbox="1061 1348 1414 1385">f) PT Bank Victoria</p> <p data-bbox="1061 1390 1414 1460">g) PT Bank Victoria Syariah</p> <p data-bbox="986 1465 1437 1535">7) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</p> <p data-bbox="986 1540 1369 1577">8) Sitaan Kepolisian</p> <p data-bbox="986 1582 1485 1694">9) Barang Rampasan Negara Komisi Pemberantasan Korupsi</p> <p data-bbox="986 1699 1382 1736">10) Barang Gratifikasi</p> <p data-bbox="986 1741 1334 1779">11) Oditurat Militer</p> <p data-bbox="986 1784 1497 1961">12) Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang- Undang Jaminan Fidusia domisili kreditur di Kota Jakarta Barat</p> <p data-bbox="986 1966 1497 2202">13) Kementerian/Lembaga/ Badan/Komisi negara dan pemohon lelang lainnya yang termasuk dalam pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta III</p> <p data-bbox="986 2207 1485 2277">14) Pemerintah Daerah domisili di Kota Jakarta</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>Barat</p> <p>15) Badan Usaha Milik Negara/Daerah domisili di Kota Jakarta Barat</p> <p>16) Sukarela domisili pemohon di Kota Jakarta Barat</p> <p>17) Aset Eks Bank Dalam Likuidasi domisili di Kota Jakarta Barat</p> <p>18) Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional/PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) domisili di Kota Jakarta Barat</p> <p>19) Aset Eks <i>Settlement</i> Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU) domisili Jakarta Barat</p> <p>20) Pemohon lelang domisili di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta</p>
4.	KPKNL Jakarta IV	Pengelolaan Kekayaan Negara	<p>A. Pengelolaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga/Badan/Komisi negara di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mahkamah Konstitusi 2) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 3) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan 4) Kementerian Dalam Negeri 5) Kementerian Hukum 6) Kementerian Hak Asasi Manusia 7) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 8) Kementerian Perindustrian 9) Kementerian Koperasi 10) Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			Menengah 11) Kepolisian Negara Republik Indonesia 12) Badan Kepegawaian Negara 13) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 14) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 15) Badan Pengawas Obat dan Makanan 16) Badan Pusat Statistik 17) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 18) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 19) Lembaga Ketahanan Nasional 20) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 21) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
			B. Pengelolaan kekayaan negara lain-lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi: 1) Barang Rampasan Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan 2) Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Jakarta Selatan 3) Aset Lain-Lain 4) Hak atas Bumi, Air, dan Tata Ruang Angkasa
			C. Pengelolaan barang milik negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Kota Jakarta Selatan
		Penilaian	A. Objek penilaian yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas: 1) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk barang milik negara dan kekayaan negara lain-lain sesuai pembagian

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>lingkup/wilayah kerja pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta IV</p> <p>2) Permohonan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengurusan piutang negara KPKNL Jakarta IV</p> <p>3) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk barang milik negara dan kekayaan negara lain-lain yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Badan/Komisi negara lingkup pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta IV yang berdomisili di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>B. Objek penilaian yang berada di wilayah Kota Jakarta Selatan atas permohonan penilaian dan analisis yang terpisah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber Daya Alam 2) Kekayaan Negara yang Dipisahkan 3) Penilaian Lainnya dalam rangka Pengelolaan Kekayaan Negara 4) Barang Milik Daerah/ Kekayaan Daerah 5) Aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah 6) Aset Lembaga/Badan Hukum Non Swasta Lainnya 7) Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara untuk Keperluan Penyusunan Neraca Pemerintah Pusat maupun Pengelolaan Kekayaan Negara

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>8) Sitaan oleh Pihak yang Berwenang sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Odituratur Militer, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p>
		Piutang Negara	<p>A. Pengurusan dan pengelolaan piutang negara di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari penyerah piutang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mahkamah Agung 2) Kementerian Perhubungan 3) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 4) Kementerian Kehutanan 5) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 6) Badan Informasi Geospasial 7) Badan Kepegawaian Negara 8) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 9) Badan Narkotika Nasional 10) Badan Nasional Pengelola Perbatasan 11) Badan Pengawas Pemilihan Umum 12) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 13) Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura 14) Badan Nasional

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>Pencarian dan Pertolongan</p> <p>15) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>16) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila</p> <p>17) DJKN (Aset Kredit Eks Bank Dalam Likuidasi)</p> <p>18) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan domisili di Kotamadya Jakarta Selatan</p> <p>19) Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit dalam lingkup tugas Kementerian Kesehatan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RSUP Fatmawati - RS Cipto Mangunkusumo - RSJP Harapan Kita - RSAB Harapan Kita - RS Pusat Otak Nasional
		Lelang	<p>A. Objek lelang yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas permohonan lelang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Eksekusi benda sitaan Panitia Urusan Piutang Negara dari KPKNL Jakarta IV 2) Balai Lelang 3) Eksekusi benda sitaan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan 4) Eksekusi benda sitaan Pajak Lingkup Kanwil DJP Jakarta Selatan I dan Jakarta Selatan II 5) Eksekusi Harta Pailit yang kuratornya berdomisili di Kota Jakarta Selatan 6) Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Kreditur:

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<ul style="list-style-type: none"> a) PT Bank Pembangunan Daerah b) PT Bank Pembangunan Daerah Syariah c) PT Bank Danamon d) PT Bank Danamon Syariah e) PT Bank Bukopin f) Bank Syariah Bukopin g) PT Global Superinvest h) PT Bank SBI Indonesia i) PT Bank UOB j) HSBC 7) Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia domisili kreditur di Kota Jakarta Selatan 8) Kementerian/Lembaga/Badan/Komisi negara dan pemohon lelang lainnya yang termasuk dalam pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta IV 9) Pemerintah Daerah domisili di Kota Jakarta Selatan 10) Badan Usaha Milik Negara/Daerah domisili di Kota Jakarta Selatan 11) Sukarela domisili pemohon di Kota Jakarta Selatan 12) Aset Eks Bank Dalam Likuidasi domisili di Kota Jakarta Selatan 13) Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional/PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) domisili di Kota Jakarta Selatan 14) Aset Eks <i>Settlement</i> Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			Pengakuan Utang (APU) domisili Jakarta Selatan 15) Pemohon lelang domisili di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta
5.	KPKNL Jakarta V	Pengelolaan Kekayaan Negara	A. Pengelolaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga/Badan/Komisi di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian Pertahanan 2) Kementerian Komunikasi dan Digital 3) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4) Kementerian Badan Usaha Milik Negara 5) Markas Besar Tentara Nasional Indonesia 6) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 7) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut 8) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 9) Arsip Nasional Republik Indonesia 10) Badan Nasional Pengelola Perbatasan 11) Badan Keamanan Laut 12) Badan Siber dan Sandi Negara 13) Dewan Ketahanan Nasional 14) Komisi Pengawas Persaingan Usaha 15) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 16) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 17) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>B. Pengelolaan kekayaan negara lain-lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Barang Rampasan Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Timur 2) Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Jakarta Timur 3) Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional
		Penilaian	<p>C. Pengelolaan barang milik negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Kota Jakarta Timur</p> <p>A. Objek penilaian yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk barang milik negara dan kekayaan negara lain-lain sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta V 2) Permohonan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengurusan piutang negara KPKNL Jakarta V 3) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk barang milik negara dan kekayaan negara lain-lain yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Badan/Komisi negara lingkup pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta V yang berdomisili di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>B. Objek penilaian yang berada di wilayah Kota Jakarta Timur atas permohonan penilaian dan analisis yang terpisah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber Daya Alam 2) Kekayaan Negara yang Dipisahkan 3) Penilaian Lainnya dalam rangka Pengelolaan Kekayaan Negara 4) Barang Milik Daerah/ Kekayaan Daerah 5) Aset Badan Usaha Milik Negara/ Daerah 6) Aset Lembaga/ Badan Hukum Non Swasta Lainnya 7) Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara untuk Keperluan Penyusunan Neraca Pemerintah Pusat maupun Pengelolaan Kekayaan Negara 8) Sitaan oleh Pihak yang Berwenang sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Odituratur Militer, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
		Piutang Negara	<p>A. Pengurusan dan pengelolaan piutang negara di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari penyerah piutang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2) Kementerian Pertahanan 3) Kementerian Agama 4) Kementerian Keuangan 5) Kementerian Sosial 6) Kementerian Energi dan

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>Sumber Daya Mineral</p> <p>7) Kementerian Komunikasi dan Digital</p> <p>8) Kementerian Pertanian</p> <p>9) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</p> <p>10) Kementerian Koperasi</p> <p>11) Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p> <p>12) Kejaksaan Republik Indonesia</p> <p>13) Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p>14) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>15) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia</p> <p>16) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia</p> <p>17) Markas Besar Tentara Nasional Indonesia</p> <p>18) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat</p> <p>19) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut</p> <p>20) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara</p> <p>21) Badan Keamanan Laut</p> <p>22) Lembaga Ketahanan Nasional</p> <p>23) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan domisili di Kotamadya Jakarta Timur</p> <p>24) Badan Bank Tanah</p> <p>25) DJKN [Piutang Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) bukan Eks Penanganan Kejaksaan dan Kepolisian, Aset Eks Kelolaan Badan</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			Penyehatan Perbankan Nasional, dan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi]
		Lelang	<p>A. Objek lelang yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas permohonan lelang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Eksekusi benda sitaan Panitia Urusan Piutang Negara dari KPKNL Jakarta V 2) Balai Lelang 3) Eksekusi benda sitaan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Kejaksaan Negeri Jakarta Timur 4) Eksekusi benda sitaan Pajak Lingkup Kanwil DJP Jakarta Timur 5) Eksekusi Harta Pailit yang kuratornya berdomisili di Kota Jakarta Timur 6) Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Kreditur: <ol style="list-style-type: none"> a) PT Bank Tabungan Negara b) PT Bank Tabungan Negara Syariah c) Bank CIMB Niaga d) Bank CIMB Niaga Syariah e) Perorangan f) Koperasi Simpan Pinjam g) Koperasi Simpan Pinjam Syariah h) Pemegang Hak Tanggungan Pertama lainnya yang tidak termasuk lingkup/wilayah kerja KPKNL Jakarta I s.d. KPKNL Jakarta IV i) PT Bank UOB j) HSBC 7) Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang-

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>Undang Jaminan Fidusia domisili kreditur di Kota Jakarta Timur</p> <p>8) Kementerian/Lembaga/Badan/Komisi negara dan pemohon lelang lainnya yang termasuk dalam pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta V</p> <p>9) Pemerintah Daerah domisili di Kota Jakarta Timur</p> <p>10) Badan Usaha Milik Negara/Daerah domisili di Kota Jakarta Timur</p> <p>11) Sukarela domisili pemohon di Kota Jakarta Timur</p> <p>12) Aset Eks Bank Dalam Likuidasi domisili di Kota Jakarta Timur</p> <p>13) Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional/PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) domisili di Kota Jakarta Timur</p> <p>14) Aset Eks <i>Settlement</i> Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU) domisili Jakarta Timur</p> <p>15) Pemohon lelang domisili di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>16) Pemohon lelang lainnya yang tidak termasuk lingkup/wilayah kerja KPKNL Jakarta I s.d. KPKNL Jakarta IV</p> <p>17) Eksekusi barang gadai</p> <p>18) Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai</p> <p>19) Eksekusi barang temuan</p> <p>20) Eksekusi barang rampasan</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP
			<p>21) Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan untuk pemenuhan pidana uang pengganti atau pidana denda</p> <p>22) Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</p> <p>23) Eksekusi benda sitaan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>24) Eksekusi benda sitaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer</p> <p>25) Eksekusi barang bukti sitaan yang berasal dari penanganan tindak pidana kehutanan sesuai pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan</p> <p>26) Eksekusi benda sitaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Pasal 47A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019</p> <p>27) Lelang lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 KEKAYAAN NEGARA
 NOMOR KEP-50/KN/2025
 TENTANG
 PEMBAGIAN TUGAS PADA INSTANSI
 VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL
 KEKAYAAN NEGARA

PEMBAGIAN TUGAS
 SEKSI PADA KANTOR WILAYAH
 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
1.	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I	Kementerian/ Lembaga/Badan/ Komisi Negara Lingkup I	1.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
			2.	Kementerian Koordinator Bidang Pangan
			3.	Kementerian Sekretariat Negara
			4.	Kementerian Dalam Negeri
			5.	Kementerian Keuangan
			6.	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
			7.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
			8.	Kementerian Kebudayaan
			9.	Kementerian Kesehatan
			10.	Kementerian Perindustrian
			11.	Kementerian Perdagangan
			12.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
			13.	Kementerian Pekerjaan Umum
			14.	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
			15.	Kementerian Perhubungan
			16.	Kementerian Pertanian
			17.	Kementerian Kehutanan
			18.	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
			19.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
			20.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
			21.	Kementerian Koperasi
			22.	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
			23.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			24.	Badan Informasi Geospasial
			25.	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			26.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
			27.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
			28.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
			29.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
			30.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
			31.	Badan Standardisasi Nasional
			32.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
			33.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
			34.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain Lingkup I	1.	Aset dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)/Kontrak Bagi Hasil (KBH)/Kontrak <i>Production Sharing</i> (KPS), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (KKOB) Panas Bumi
			2.	Aset Eks Kepabeanan dan Cukai
			3.	Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT)
			4.	Aset Eks Bank Dalam Likuidasi
			5.	Aset Lain-Lain
		Pembinaan dan Pengoordinasian pada KPKNL Lingkup I	1.	Kanwil DJKN Aceh a) KPKNL Banda Aceh
			2.	Kanwil DJKN Sumatera Utara a) KPKNL Medan
			3.	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau a) KPKNL Padang
			4.	Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung a) KPKNL Jambi
			5.	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu a) KPKNL Bengkulu
			6.	Kanwil DJKN Banten a) KPKNL Serang
			7.	Kanwil DJKN DKI Jakarta a) KPKNL Jakarta I b) KPKNL Jakarta V
			8.	Kanwil DJKN Jawa Barat a) KPKNL Bandung b) KPKNL Bekasi
			9.	Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta a) KPKNL Semarang b) KPKNL Pekalongan
			10.	Kanwil DJKN Jawa Timur a) KPKNL Surabaya

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

3

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
				b) KPKNL Pamekasan
			11.	Kanwil DJKN Kalimantan Barat a) KPKNL Pontianak
			12.	Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah a) KPKNL Palangkaraya
			13.	Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara a) KPKNL Samarinda
			14.	Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara a) KPKNL Denpasar b) KPKNL Singaraja
			15.	Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat a) KPKNL Mamuju b) KPKNL Makassar
			16.	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara a) KPKNL Manado
			17.	Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku a) KPKNL Jayapura
2.	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II	Kementerian/ Lembaga/Badan/ Komisi Negara Lingkup II	1.	Mahkamah Agung Republik Indonesia
			2.	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
			3.	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
			4.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
			5.	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			6.	Kementerian Luar Negeri
			7.	Kementerian Agama
			8.	Badan Penyelenggara Haji
			9.	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
			10.	Kementerian Hukum
			11.	Kementerian Hak Asasi Manusia
			12.	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
			13.	Kementerian Sosial
			14.	Kementerian Ketenagakerjaan
			15.	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
			16.	Kementerian Transmigrasi
			17.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
			18.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
			19.	Kementerian Pariwisata

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

4

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			20.	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
			21.	Kejaksaan Republik Indonesia
			22.	Arsip Nasional Republik Indonesia
			23.	Badan Kepegawaian Negara
			24.	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
			25.	Badan Narkotika Nasional
			26.	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
			27.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
			28.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
			29.	Badan Pusat Statistik
			30.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
			31.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
			32.	Komisi Pemberantasan Korupsi
			33.	Komisi Pemilihan Umum
			34.	Komisi Yudisial
			35.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
			36.	Ombudsman Republik Indonesia
		Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain Lingkup II	1.	Barang Rampasan Negara
			2.	Barang Gratifikasi
			3.	Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)
			4.	Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
		Pembinaan dan Pengoordinasian pada KPKNL Lingkup II	1.	Kanwil DJKN Aceh a) KPKNL Banda Aceh
			2.	Kanwil DJKN Sumatera Utara a) KPKNL Pematangsiantar b) KPKNL Kisaran
			3.	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau a) KPKNL Bukittinggi b) KPKNL Pekanbaru
			4.	Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung a) KPKNL Palembang
			5.	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu a) KPKNL Bandar Lampung
			6.	Kanwil DJKN Banten a) KPKNL Tangerang I
			7.	Kanwil DJKN DKI Jakarta a) KPKNL Jakarta II b) KPKNL Jakarta IV

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			8.	Kanwil DJKN Jawa Barat a) KPKNL Bogor b) KPKNL Purwakarta
			9.	Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta a) KPKNL Surakarta b) KPKNL Tegal
			10.	Kanwil DJKN Jawa Timur a) KPKNL Sidoarjo b) KPKNL Malang
			11.	Kanwil DJKN Kalimantan Barat a) KPKNL Pontianak
			12.	Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah a) KPKNL Pangkalan Bun
			13.	Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara a) KPKNL Balikpapan b) KPKNL Bontang
			14.	Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara a) KPKNL Kupang
			15.	Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat a) KPKNL Pare-Pare b) KPKNL Palopo
			16.	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara a) KPKNL Palu
			17.	Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku a) KPKNL Sorong
3.	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara III	Kementerian/ Lembaga/Badan/ Komisi Negara Lingkup III	1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
			2.	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
			3.	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
			4.	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
			5.	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan
			6.	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
			7.	Kementerian Pertahanan
			8.	Kementerian Komunikasi dan Digital
			9.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
			10.	Kementerian Pemuda dan Olahraga

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

6

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			11.	Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI)
			12.	Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD)
			13.	Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut (TNI-AL)
			14.	Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU)
			15.	Kepolisian Negara Republik Indonesia
			16.	Badan Intelijen Negara
			17.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
			18.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
			19.	Badan Pengawas Pemilihan Umum
			20.	Badan Keamanan Laut
			21.	Badan Siber dan Sandi Negara
			22.	Dewan Ketahanan Nasional
			23.	Lembaga Administrasi Negara
			24.	Lembaga Ketahanan Nasional
			25.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
			26.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
			27.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
			28.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
			29.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
			30.	Otoritas Jasa Keuangan
			31.	Otorita Ibu Kota Nusantara
			32.	Badan Karantina Indonesia
			33.	Badan Pangan Nasional
			34.	Badan Gizi Nasional
		Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain Lingkup III	1.	Hak atas Bumi, Air, dan Tata Ruang Angkasa
			2.	Hak atas Kekayaan Intelektual
			3.	Benda Cagar Budaya yang Belum Ditetapkan Statusnya sebagai Barang Milik Negara
			4.	Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional
		Pembinaan dan Pengoordinasian pada KPKNL Lingkup III	1.	Kanwil DJKN Aceh a) KPKNL Lhokseumawe
			2.	Kanwil DJKN Sumatera Utara a) KPKNL Padangsidempuan
			3.	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau a) KPKNL Batam b) KPKNL Dumai

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

7

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			4.	Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung a) KPKNL Lahat b) KPKNL Pangkal Pinang
			5.	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu a) KPKNL Metro
			6.	Kanwil DJKN Banten a) KPKNL Tangerang II
			7.	Kanwil DJKN DKI Jakarta a) KPKNL Jakarta III
			8.	Kanwil DJKN Jawa Barat a) KPKNL Tasikmalaya b) KPKNL Cirebon
			9.	Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta a) KPKNL Yogyakarta b) KPKNL Purwokerto
			10.	Kanwil DJKN Jawa Timur a) KPKNL Jember b) KPKNL Madiun
			11.	Kanwil DJKN Kalimantan Barat a) KPKNL Singkawang
			12.	Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah a) KPKNL Banjarmasin
			13.	Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara a) KPKNL Tarakan
			14.	Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara a) KPKNL Mataram b) KPKNL Bima
			15.	Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat a) KPKNL Kendari
			16.	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara a) KPKNL Gorontalo b) KPKNL Ternate
			17.	Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku a) KPKNL Ambon b) KPKNL Biak
4.	Seksi Piutang Negara I	Kementerian/ Lembaga/Badan/ Komisi Negara Lingkup I	1.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
			2.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
			3.	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			4.	Kementerian Koordinator Bidang Pangan
			5.	Kementerian Sekretariat Negara
			6.	Kementerian Dalam Negeri

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS
			7. Kementerian Keuangan
			8. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
			9. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
			10. Kementerian Kebudayaan
			11. Kementerian Kesehatan
			12. Kementerian Perindustrian
			13. Kementerian Perdagangan
			14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
			15. Kementerian Pekerjaan Umum
			16. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
			17. Kementerian Perhubungan
			18. Kementerian Komunikasi dan Digital
			19. Kementerian Pertanian
			20. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
			21. Kementerian Kehutanan
			22. Kementerian Kelautan dan Perikanan
			23. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
			24. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
			25. Kementerian Koperasi
			26. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
			27. Kementerian Pariwisata
			28. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
			29. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			30. Kementerian Pemuda dan Olahraga
			31. Kepolisian Negara Republik Indonesia
			32. Badan Informasi Geospasial
			33. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
			34. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
			35. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
			36. Badan Pengawas Tenaga Nuklir

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			37.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
			38.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
			39.	Badan Pusat Statistik
			40.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
			41.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
			42.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
			43.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
			44.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
			45.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
			46.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
			47.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
			48.	Badan Standardisasi Nasional
			49.	DJKN Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional
			50.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
			51.	Badan Bank Tanah
			52.	Lembaga Penjamin Simpanan
		Pembinaan dan Pengoordinasian pada KPKNL Lingkup I	1.	Kanwil DJKN Aceh a) KPKNL Banda Aceh
			2.	Kanwil DJKN Sumatera Utara a) KPKNL Medan b) KPKNL Kisaran
			3.	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau a) KPKNL Bukittinggi b) KPKNL Dumai
			4.	Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung a) KPKNL Palembang b) KPKNL Lahat
			5.	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu a) KPKNL Bengkulu
			6.	Kanwil DJKN Banten a) KPKNL Tangerang I
			7.	Kanwil DJKN DKI Jakarta a) KPKNL Jakarta II b) KPKNL Jakarta IV
			8.	Kanwil DJKN Jawa Barat a) KPKNL Bogor b) KPKNL Tasikmalaya c) KPKNL Cirebon

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			9.	Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta a) KPKNL Pekalongan b) KPKNL Yogyakarta c) KPKNL Purwokerto
			10.	Kanwil DJKN Jawa Timur a) KPKNL Surabaya b) KPKNL Jember c) KPKNL Pamekasan
			11.	Kanwil DJKN Kalimantan Barat a) KPKNL Pontianak
			12.	Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah a) KPKNL Palangkaraya b) KPKNL Pangkalan Bun
			13.	Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara a) KPKNL Samarinda b) KPKNL Bontang
			14.	Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara a) KPKNL Mataram b) KPKNL Kupang
			15.	Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat a) KPKNL Makassar
			16.	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara a) KPKNL Manado b) KPKNL Ternate
			17.	Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku a) KPKNL Ambon b) KPKNL Biak
5.	Seksi Piutang Negara II	Kementerian/ Lembaga/Badan/ Komisi Negara Lingkup II	1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
			2.	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
			3.	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
			4.	Mahkamah Agung Republik Indonesia
			5.	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
			6.	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
			7.	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
			8.	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
			9.	Kementerian Luar Negeri
			10.	Kementerian Pertahanan
			11.	Kementerian Agama

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			12.	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Masyarakat
			13.	Kementerian Hukum
			14.	Kementerian Hak Asasi Manusia
			15.	Kementerian Imigrasi dan Masyarakat
			16.	Kementerian Sosial
			17.	Kementerian Ketenagakerjaan
			18.	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
			19.	Kementerian Transmigrasi
			20.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
			21.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
			22.	Kejaksaan Republik Indonesia
			23.	Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI)
			24.	Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD)
			25.	Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut (TNI-AL)
			26.	Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU)
			27.	Arsip Nasional Republik Indonesia
			28.	Badan Intelijen Negara
			29.	Badan Kepegawaian Negara
			30.	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
			31.	Badan Narkotika Nasional
			32.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
			33.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
			34.	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
			35.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
			36.	Badan Pengawas Pemilihan Umum
			37.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
			38.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
			39.	Badan Keamanan Laut
			40.	Badan Siber dan Sandi Negara
			41.	Dewan Ketahanan Nasional
			42.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			43.	Komisi Pemberantasan Korupsi
			44.	Komisi Pemilihan Umum
			45.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
			46.	Komisi Yudisial
			47.	Lembaga Administrasi Negara
			48.	Lembaga Ketahanan Nasional
			49.	Ombudsman Republik Indonesia
			50.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
			51.	DJKN Eks Bank Dalam Likuidasi
			52.	DJKN Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
			53.	Otoritas Jasa Keuangan
			54.	Otorita Ibu Kota Nusantara
			55.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
			56.	Bank Indonesia
			57.	Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum
		Pembinaan dan Pengoordinasian pada KPKNL Lingkup II	1.	Kanwil DJKN Aceh a) KPKNL Lhokseumawe
			2.	Kanwil DJKN Sumatera Utara a) KPKNL Pematangsiantar b) KPKNL Padangsidimpuan
			3.	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau a) KPKNL Padang b) KPKNL Pekanbaru c) KPKNL Batam
			4.	Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung a) KPKNL Jambi b) KPKNL Pangkal Pinang
			5.	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu a) KPKNL Bandar Lampung b) KPKNL Metro
			6.	Kanwil DJKN Banten a) KPKNL Serang b) KPKNL Tangerang II
			7.	Kanwil DJKN DKI Jakarta a) KPKNL Jakarta I b) KPKNL Jakarta III c) KPKNL Jakarta V
			8.	Kanwil DJKN Jawa Barat a) KPKNL Bandung b) KPKNL Bekasi c) KPKNL Purwakarta
			9.	Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta a) KPKNL Semarang b) KPKNL Surakarta c) KPKNL Tegal

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			10.	Kanwil DJKN Jawa Timur a) KPKNL Sidoarjo b) KPKNL Malang c) KPKNL Madiun
			11.	Kanwil DJKN Kalimantan Barat a) KPKNL Singkawang
			12.	Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah a) KPKNL Banjarmasin
			13.	Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara a) KPKNL Balikpapan b) KPKNL Tarakan
			14.	Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara a) KPKNL Denpasar b) KPKNL Singaraja c) KPKNL Bima
			15.	Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat a) KPKNL Mamuju b) KPKNL Pare-Pare c) KPKNL Palopo d) KPKNL Kendari
			16.	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara a) KPKNL Gorontalo b) KPKNL Palu
			17.	Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku a) KPKNL Jayapura b) KPKNL Sorong
6.	Seksi Penilaian I	Kementerian/ Lembaga/Badan/ Komisi Negara Lingkup I	1.	Kementerian Koordinator Bidang Pangan
			2.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
			3.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
			4.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
			5.	Kementerian Dalam Negeri
			6.	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
			7.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
			8.	Kementerian Kebudayaan
			9.	Kementerian Kehutanan
			10.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
			11.	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
			12.	Kementerian Kesehatan

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS
			13. Kementerian Keuangan
			14. Kementerian Komunikasi dan Digital
			15. Kementerian Koperasi
			16. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
			17. Kementerian Pariwisata
			18. Kementerian Pekerjaan Umum
			19. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			20. Kementerian Pemuda dan Olahraga
			21. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
			22. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
			23. Kementerian Perdagangan
			24. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
			25. Kementerian Perhubungan
			26. Kementerian Perindustrian
			27. Kementerian Pertanian
			28. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
			29. Kementerian Sekretariat Negara
			30. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
			31. Badan Gizi Nasional
			32. Badan Informasi Geospasial
			33. Badan Karantina Indonesia
			34. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
			35. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
			36. Badan Pangan Nasional
			37. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
			38. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
			39. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
			40. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang
			41. Badan Pusat Statistik
			42. Badan Riset dan Inovasi Nasional
			43. Badan Standardisasi Nasional
			44. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
			45. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			46.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
			47.	Kepolisian Negara Republik Indonesia
			48.	Otorita Ibu Kota Nusantara
			49.	Otoritas Jasa Keuangan
			50.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
			51.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
			52.	Aset dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)/Kontrak Bagi Hasil (KBH)/Kontrak <i>Production Sharing</i> (KPS), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (KKOB) Panas Bumi
			53.	Aset Eks Kepabeanan dan Cukai
			54.	Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT)
			55.	Aset Eks Bank Dalam Likuidasi
			56.	Benda Cagar Budaya yang Belum Ditetapkan Statusnya sebagai Barang Milik Negara
			57.	Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional
			58.	Penilaian atas Permohonan Pihak Lain
		Pembinaan dan Pengoordinasian pada KPKNL Lingkup I	1.	Kanwil DJKN Aceh a) KPKNL Banda Aceh
			2.	Kanwil DJKN Sumatera Utara a) KPKNL Medan b) KPKNL Pematangsiantar
			3.	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau a) KPKNL Pekanbaru b) KPKNL Dumai
			4.	Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung a) KPKNL Palembang b) KPKNL Lahat
			5.	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu a) KPKNL Bandar Lampung b) KPKNL Metro
			6.	Kanwil DJKN Banten a) KPKNL Serang
			7.	Kanwil DJKN DKI Jakarta a) KPKNL Jakarta I b) KPKNL Jakarta V
			8.	Kanwil DJKN Jawa Barat a) KPKNL Bandung b) KPKNL Tasikmalaya c) KPKNL Cirebon

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			9.	Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta a) KPKNL Semarang b) KPKNL Surakarta c) KPKNL Pekalongan
			10.	Kanwil DJKN Jawa Timur a) KPKNL Surabaya b) KPKNL Pamekasan c) KPKNL Madiun
			11.	Kanwil DJKN Kalimantan Barat a) KPKNL Pontianak
			12.	Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah a) KPKNL Banjarmasin
			13.	Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara a) KPKNL Balikpapan b) KPKNL Samarinda
			14.	Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara a) KPKNL Denpasar b) KPKNL Kupang
			15.	Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat a) KPKNL Makassar b) KPKNL Palopo
			16.	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara a) KPKNL Manado b) KPKNL Ternate
			17.	Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku a) KPKNL Jayapura b) KPKNL Biak
7.	Seksi Penilaian II	Kementerian/ Lembaga/Badan/ Komisi Negara Lingkup II	1.	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan
			2.	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
			3.	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			4.	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
			5.	Kementarian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
			6.	Kementerian Agama
			7.	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
			8.	Kementerian Hak Asasi Manusia
			9.	Kementerian Hukum
			10.	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS
			11. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
			12. Kementerian Ketenagakerjaan
			13. Kementerian Luar Negeri
			14. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
			15. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
			16. Kementerian Pertahanan
			17. Kementerian Sosial
			18. Kementerian Transmigrasi
			19. Badan Intelijen Negara
			20. Badan Keamanan Laut
			21. Badan Kepegawaian Negara
			22. Badan Narkotika Nasional
			23. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
			24. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
			25. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
			26. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
			27. Badan Pengawas Obat dan Makanan
			28. Badan Pengawas Pemilihan Umum
			29. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
			30. Badan Penyelenggara Haji
			31. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
			32. Badan Siber dan Sandi Negara
			33. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
			34. Komisi Pemberantasan Korupsi
			35. Komisi Pemilihan Umum
			36. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
			37. Komisi Yudisial
			38. Dewan Ketahanan Nasional
			39. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
			40. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
			41. Lembaga Administrasi Negara
			42. Lembaga Ketahanan Nasional
			43. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
			44. Arsip Nasional Republik Indonesia

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			45.	Kejaksaan Republik Indonesia
			46.	Mahkamah Agung Republik Indonesia
			47.	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
			48.	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
			49.	Ombudsman Republik Indonesia
			50.	Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI)
			51.	Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD)
			52.	Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut (TNI-AL)
			53.	Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU)
			54.	Barang Rampasan Negara
			55.	Barang Gratifikasi
			56.	Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)
			57.	Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
			58.	Hak atas Bumi, Air, dan Tata Ruang Angkasa
			59.	Hak atas Kekayaan Intelektual
			60.	Penilaian atas Permohonan Pihak Lain
		Pembinaan dan Pengoordinasian pada KPKNL Lingkup II	1.	Kanwil DJKN Aceh a) KPKNL Lhokseumawe
			2.	Kanwil DJKN Sumatera Utara a) KPKNL Kisaran b) KPKNL Padangsidimpuan
			3.	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau a) KPKNL Padang b) KPKNL Bukittinggi c) KPKNL Batam
			4.	Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung a) KPKNL Jambi b) KPKNL Pangkal Pinang
			5.	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu a) KPKNL Bengkulu
			6.	Kanwil DJKN Banten a) KPKNL Tangerang I b) KPKNL Tangerang II
			7.	Kanwil DJKN DKI Jakarta a) KPKNL Jakarta II b) KPKNL Jakarta III c) KPKNL Jakarta IV
			8.	Kanwil DJKN Jawa Barat a) KPKNL Bekasi b) KPKNL Bogor c) KPKNL Purwakarta

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			9.	Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta a) KPKNL Tegal b) KPKNL Yogyakarta c) KPKNL Purwokerto
			10.	Kanwil DJKN Jawa Timur a) KPKNL Sidoarjo b) KPKNL Malang c) KPKNL Jember
			11.	Kanwil DJKN Kalimantan Barat a) KPKNL Singkawang
			12.	Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah a) KPKNL Palangkaraya b) KPKNL Pangkalan Bun
			13.	Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara a) KPKNL Tarakan b) KPKNL Bontang
			14.	Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara a) KPKNL Singaraja b) KPKNL Mataram c) KPKNL Bima
			15.	Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat a) KPKNL Mamuju b) KPKNL Pare-Pare c) KPKNL Kendari
			16.	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara a) KPKNL Gorontalo b) KPKNL Palu
			17.	Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku a) KPKNL Ambon b) KPKNL Sorong
8.	Seksi Bimbingan Lelang I	Pembinaan dan Pengoordinasian pada KPKNL Lingkup I	1.	Kanwil DJKN Aceh a) KPKNL Lhokseumawe
			2.	Kanwil DJKN Sumatera Utara a) KPKNL Medan b) KPKNL Kisaran
			3.	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau a) KPKNL Padang b) KPKNL Bukittinggi
			4.	Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung a) KPKNL Jambi b) KPKNL Pangkal Pinang
			5.	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu a) KPKNL Bandar Lampung b) KPKNL Metro

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			6.	Kanwil DJKN Banten a) KPKNL Serang b) KPKNL Tangerang II
			7.	Kanwil DJKN DKI Jakarta a) KPKNL Jakarta I b) KPKNL Jakarta II c) KPKNL Jakarta III
			8.	Kanwil DJKN Jawa Barat a) KPKNL Bandung b) KPKNL Cirebon c) KPKNL Tasikmalaya
			9.	Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta a) KPKNL Semarang b) KPKNL Pekalongan c) KPKNL Tegal
			10.	Kanwil DJKN Jawa Timur a) KPKNL Surabaya b) KPKNL Jember c) KPKNL Madiun
			11.	Kanwil DJKN Kalimantan Barat a) KPKNL Pontianak
			12.	Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah a) KPKNL Palangkaraya b) KPKNL Pangkalan Bun
			13.	Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara a) KPKNL Balikpapan b) KPKNL Tarakan
			14.	Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara a) KPKNL Denpasar b) KPKNL Kupang
			15.	Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat a) KPKNL Makassar
			16.	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara a) KPKNL Manado b) KPKNL Ternate
			17.	Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku a) KPKNL Ambon b) KPKNL Sorong
9.	Seksi Bimbingan Lelang II	Pembinaan dan Pengoordinasian pada KPKNL Lingkup II	1.	Kanwil DJKN Aceh a) KPKNL Banda Aceh
			2.	Kanwil DJKN Sumatera Utara a) KPKNL Pematangsiantar b) KPKNL Padangsidimpuan
			3.	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau a) KPKNL Pekanbaru b) KPKNL Batam c) KPKNL Dumai

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS
			4. Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung a) KPKNL Palembang b) KPKNL Lahat
			5. Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu a) KPKNL Bengkulu
			6. Kanwil DJKN Banten a) KPKNL Tangerang I
			7. Kanwil DJKN DKI Jakarta a) KPKNL Jakarta IV b) KPKNL Jakarta V
			8. Kanwil DJKN Jawa Barat a) KPKNL Bekasi b) KPKNL Bogor c) KPKNL Purwakarta
			9. Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta a) KPKNL Surakarta b) KPKNL Yogyakarta c) KPKNL Purwokerto
			10. Kanwil DJKN Jawa Timur a) KPKNL Malang b) KPKNL Sidoarjo c) KPKNL Pamekasan
			11. Kanwil DJKN Kalimantan Barat a) KPKNL Singkawang
			12. Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah a) KPKNL Banjarmasin
			13. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara a) KPKNL Samarinda b) KPKNL Bontang
			14. Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara a) KPKNL Singaraja b) KPKNL Mataram c) KPKNL Bima
			15. Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat a) KPKNL Mamuju b) KPKNL Pare-Pare c) KPKNL Palopo d) KPKNL Kendari
			16. Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara a) KPKNL Gorontalo b) KPKNL Palu
			17. Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku a) KPKNL Jayapura b) KPKNL Biak

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN